

BAB II

DAMPAK IMPOR LIMBAH SERTA ASAL MUASAL TERBENTUKNYA *NATIONAL SWORD CHINA POLICY*

Isu keamanan merupakan sesuatu yang penting dan terus berkembang dikarenakan isu keamanan saat ini mulai meluas ke dalam sektor individu. Perlunya setiap negara kemudian menjamin keamanan individu dari adanya ancaman yang setiap saat akan datang. Oleh sebab itu, Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi yang kuat berupaya untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan terbentuknya *National Sword China Policy*.

Di dalam bab ini penulis akan mencoba menjelaskan beberapa aspek-aspek yang akan membantu dalam menganalisis di bab selanjutnya. Penulis mengawalinya dengan beberapa uraian dengan menjelaskan Kebijakan dan dampak impor limbah serta asal muasal terbentuknya *National Sword China Policy*. Pada sub bab berikutnya penulis akan menjelaskan kesimpulan bab yang telah dibahas sebelumnya.

2.1. Kebijakan Impor Sampah Tiongkok

Tiongkok menjadi salah satu negara yang punya catatan impor limbah yang terbilang cukup tinggi terutama plastik. Kebijakan ini bermula sekitar tahun 1990 dimana pada saat itu terjadi perkembangan yang pesat di aspek ekonomi dan standar hidup, sehingga Tiongkok disebut sebagai “*foreign trash*” dikarenakan limbah negara – negara banyak dikirim ke Tiongkok (Baxter & Hua, 2017). Adanya peningkatan ini pun mengakibatkan peningkatan pula permintaan terhadap

beberapa bahan baku khususnya plastik sebesar 21 persen setiap tahunnya (Beukering, Yongjiang, Yumin, & Xin, 1997, p. 2). Peningkatan kebutuhan hidup tentunya memiliki dampak yang signifikan pula terhadap peningkatan limbah yang ada. Sayangnya tidak diiringi pula dengan sistem daur ulang limbah yang efisien pada tahun itu.

Pun dalam kurun waktu 1980 hingga 1984 tingkat daur ulang limbah yang di Tiongkok turun hingga 11 persen dan hal itu memberikan dampak positif terhadap negaranya. Tahun 1995, impor daur ulang limbah Tiongkok meningkat pesat tiap tahunnya dan menjadi sepuluh kali lipat pada tahun 2016 dari 4,5 juta ton menjadi 45 juta ton (Ritchie, 2018, p. 5). Hal ini dikarenakan lebih dari 50 persen sampah daur ulang dunia di ekspor menuju Tiongkok (Schauenberg, 2019). Akibat dampak dari impor yang meningkat di beberapa kota besar, dalam jumlah besar banyak sampah plastik yang tidak didaur ulang dan menyebabkan ketegangan pada penyumbatan sistem drainase perkotaan (Beukering, Yongjiang, Yumin, & Xin, 1997, p. 3). Bahkan menurut data statistik sebanyak 60 persen sampah plastik di Tiongkok di buang atau di daur ulang pada saat itu, sehingga Tiongkok menjadi penyumbang sampah terbesar di lautan sebesar 8.8 juta ton (Jambeck, et al., 2015, pp. 769-770).

Hingga pada awal abad 21, Tiongkok menjadi salah satu produsen limbah plastik terbesar di dunia. Namun meski demikian, Tiongkok masih belum bisa memenuhi permintaan domestik mereka akan plastik (Yoshida, 2004). Setidaknya sekitar 50 persen plastik digunakan dalam proses manufaktur sekali pakai seperti pengemasan, pertanian, dan lain sebagainya. Sementara 20 hingga 25 persen sisanya digunakan untuk beberapa infrastruktur lain seperti pipa, pelapis kabel,

barang elektronik, furnitur, dan kendaraan (Hopewell, Dvorak, & Kosior, 2009, p. 1).

Selain itu peran Tiongkok menjadi produsen serta eksportir tekstil dan pakaian terbesar di dunia, menjadikan kebutuhan juga meningkat terutama dalam berbagai macam limbah bahan baku (Leng, 2018). Industri tekstil dan pakaian merupakan salah satu industri yang produktif bagi meningkatnya perekonomian Tiongkok. Tercatat bahwa tahun 2015, industri tersebut menyumbang sekitar 7% dari US\$11,06 triliun PDB negara Tiongkok (Irun, 2017, p. 7; Hanger-Kopp, Lieu, & Nikas, 2019, p. 159). Hal ini dikarenakan dengan tingginya angka ekspor yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok yang berakibat pada meningkatnya nilai keuntungan yang didapat seperti tabel berikut;

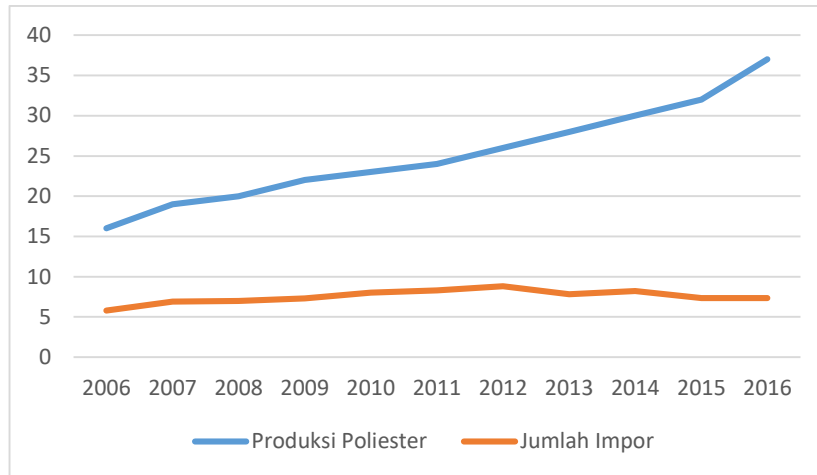
Tabel 2.1. Nilai Ekspor Tekstil dan Pakaian Tiongkok (dalam US\$)

2006	138.093.880
2007	166.105.811
2008	179.734.024
2009	161.329.393
2010	199.534.310
2011	240.539.595
2012	246.094.186
2013	274.010.292
2014	287.645.387
2015	273.464.730

2016	138.093.880
2017	166.105.811

Sumber: (World Integrate Trade Solution, 2018)

Akibat adanya peningkatan kebutuhan ekspor terhadap barang tekstil mengakibatkan peningkatan pula terhadap bahan baku yang diperlukan. Salah satu bahan yang dibutuhkan dalam produksi tekstilnya adalah *poliester*. Untuk mengamankan kebutuhan *poliester* ini Tiongkok mengambil langkah impor khususnya sampah plastik yang mengandung *poliester*. Sampah *polymer* merupakan salah satu jenis sampah plastik yang diperdagangkan untuk didaur ulang. Perdagangan limbah plastic merupakan perdagangan secara masif yang tidak hanya mengkhususkan pada satu jenis plastik. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa jenis *polymer* dalam satu botol plastik, seperti *polymer* yang terdapat pada tutup botol dan botol plastik yaitu *polypropylene* (PP) dan *polietilena tereftalat* (PET) (Society of the Plastics Industry, 1988, pp. 1-2). Akibat kebutuhan limbah bahan industrit ersebut, dari tahun 2016 sampai 2016 Tiongkok mengimpor limbah plastik secara global secara konsisten hampir 40 sampai 50 persen dari total impor.



Grafik 2.1 Volume Impor Sampah Plastik dan Total Produksi Poliester (Juta Metrik Ton)

Sumber: (UN Comtrade, 2018, p. 91)

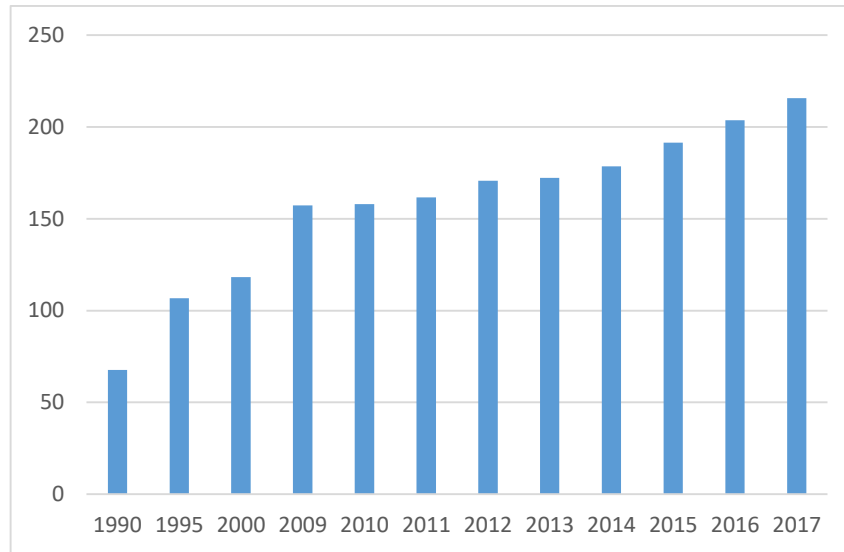
Adanya keterbukaan akan berbagai macam limbah dari berbagai negara membuat siklus perdagangan sampah dunia menempatkan Tiongkok sebagai porosnya. Setidaknya terdapat limbah 43 negara yang diterima oleh Tiongkok (Parker & Elliott, 2018). Limbah daur ulang itu diterima di *Transshipment Restrictions* yang berada di Foshan, Huangpu, Jiangmen, Shunde, Shenzhen, Zhongshan, dan lainnya (Orient Overseas Container Line, n.d.). Limbah-limbah yang diimpor ke Tiongkok didatangkan khusus sebagai komoditi yang di daur ulang. Hasilnya beberapa pelaku industri daur ulang di Tiongkok lebih memprioritaskan pengolahan sampah impor daripada sampah yang ada di domestik (The Straits Times, 2018).

Adanya impor limbah bahan baku pada dasarnya memang menimbulkan baik dampak positif ataupun negatif. Dampak positifnya, kesejahteraan Tiongkok di sektor perdagangan meningkat cukup pesat antara tahun 2009 hingga 2015.

Namun tentunya hal itu juga menimbulkan dampak negatif khususnya di sektor lingkungan. Pasalnya impor limbah bahan baku yang dilakukan Tiongkok masih massif, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pengelolaan limbah yang akan diproduksi. Semakin tingginya impor yang dilakukan Tiongkok juga akan dibarengi dengan meningkatnya polusi dihadapi.

Berdasarkan tabel 2.1 diatas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan keuntungan di sektor ekspor tekstil dan pakaian. Namun peningkatan tersebut juga diiringi pula dengan peningkatan pengeluaran anggaran akibat dampak dari limbah yang terus meningkat dari tahun ketahun. Adanya prioritas dalam mengolah sampah impor membuat pengelolaan sampah domestik menjadi tidak efisien. Hasilnya angka tingkat pencemaran lingkungan yang ada juga semakin tinggi yang tentunya diiringi dengan meningkatnya pula dana kesehatan yang dikeluarkan pemerintah.

Minimnya akses akan sampah domestik untuk di daur ulang kembali membuat TPA yang ada di Tiongkok tidak bisa menampung serta mengolah sampah domestik yang diproduksi Tiongkok. Dari data yang ada Tiongkok memiliki TPA sejumlah 580 yang memiliki kapasitas untuk menampung sampah sebanyak 104.927 juta ton (Han, et al., 2016, p. 2). Lalu untuk produksi sampah yang dimiliki Tiongkok sendiri capai 215 juta ton.



Grafik 2.2 Produksi Sampah Tiongkok (dalam Juta Ton)

Sumber: (Statista, 2019)

Adanya peningkatan jumlah produksi sampah di Tiongkok mengakibatkan terjadinya kerusakan ekologi. Selain itu akibat banyaknya sampah di TPA telah menyebabkan banyaknya pencemaran polusi air, tanah dan udara dari kandungan kimia yang didapatkan dari limbah impor bahan baku dari berbagai Kota di Tiongkok akibat kegiatan Industri (Juan, 2016). Dikarenakan Sifat senyawa kimia yang terdapat dalam plastik dapat manusia konsumsi tanpa manusia ketahui, sehingga berdampak pada kesehatan manusia itu sendiri. Di Tiongkok setidaknya terdapat 96 jenis polutan yang sudah diidentifikasi bahwa lokasinya dekat dengan TPA (Han, et al., 2016, p. 8). Hal ini juga dikarenakan adanya fasilitas pengolahan di Tiongkok yang tidak memiliki teknologi canggih dalam pengolahan bahan baku daur ulang.

Namun, terdapat tiga (3) alasan mengapa Tiongkok melakukan impor sampah plastik, pertama, dikarenakan adanya beberapa industri tekstil yang melihat bahwa produk limbah bahan baku dari luar negeri terdapat nilai kualitas yang lebih baik dibanding limbah domestik. Kedua, semenjak gabung dengan WTO, Tiongkok mulai mengekspor komoditinya dengan menggunakan kapal – kapal konteiner, sehingga para pelaku industri melihat bahwa keuntungan ini akan memberikan peluang dalam menekan biaya impor dengan cara mengisi limbah kekapal konteiner kosong bekas ekspor yang akan kembali ke Tiongkok (Mak, 2018). *Ketiga*, tingginya faktor ekspor di Tiongkok.

Tingginya ekspor di Tiongkok ini juga disebabkan, pertama adalah SDM yang berlimpah dan upah yang rendah dengan kualitas unggul. Upah para pekerja di pabrik industri terbilang di bawah jauh dari negara lain, seperti pada tahun 2005 upah di industri tekstil di Tiongkok hanya sekitar 1/18 di Inggris dan 1/21 di Amerika. Sehingga ini merupakan keuntungan ekonomi yang besar bagi Tiongkok dalam industri tekstil tanpa kehilangan keunggulan dan ini merupakan pendorong perkembangan industri (YUAN & Fu, 2007, p. 85). Kedua, adanya ketersediaan limbah bahan baku yang berlimpah didapatkan dari kegiatan impor dan domestik. Ketiga adanya *special economy zones pol(SEZs)* yang dianggap spesial dikarenakan perdagangan Tiongkok pada umumnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. SEZs ini memberikan para investor maupun para pelaku industri melakukan kegiatan bisnis tanpa campur tangan atau intervensi pemerintah pusat dalam melakukan bisnisnya, sehingga barang maupun bahan yang diekspor dapat lebih mudah, pajak berkurang maupun tanpa pajak. (Mack, 2019).

Bagi perekonomian nasional, hal tersebut bisa memberi dampak positif. Meningkatnya perekonomian negara juga difaktorkan oleh adanya PDB yang meningkat akibat daya beli masyarakat, pengeluaran yang stabil dan *foreign direct investment (FDI)*. Kebijakan SEZs telah meningkatkan masuknya FDI, hal ini semakin baik dalam memperluas dan memperbesar usaha ekonomi dari teknologi maupun industri meskipun nantinya akan berdampak pada peningkatan produktivitas industri (Cashell, 2004, p. 14). Penggunaan strategi itu, industri Tiongkok akan bisa peroleh sampah plastik dengan biaya yang rendah serta peroleh kualitas yang tinggi. Maka fokus industri tekstil modern Tiongkok pada produksi berbagai produk sintetis dengan bahan baku dasar sampah plastik impor (Bharata, Dharmiasih, & Nugraha, 2019, p. 7).

2.2. Dampak Impor Limbah Bahan Baku Terhadap Tiongkok

Secara umum, kebijakan impor limbah yang dilakukan Tiongkok didorong karena motivasi ekonomi yang tinggi dibalik tindakan tersebut. Berbagai jenis keuntungan didapatkan oleh usaha informal di Tiongkok ketika melakukan re-utilisasi terhadap tembaga, baja, aluminium, emas, dan chip komputer (Geeraerts, Illes, & Schweizer, 2015, p. 39). Impor limbah yang dilakukan Tiongkok berdampak pada tumbuh-kembangnya industri kecil dan menengah yang berfokus pada pengolahan sampah terutama sampah elektronik. Namun, banyak dari industri ini merupakan industri ilegal yang tidak memiliki standar keselamatan serta dilakukan dalam skala sangat kecil seperti industri rumahan (Millenium Project, 2007).

Sebagai salah satu negara dengan total penduduk terbilang tinggi, selain mengkonsumsi plastik juga melakukan impor limbah plastik untuk didaur ulang. Namun tidak semua jenis plastik dapat didaur ulang sehingga berdampak pada meningkatnya polusi yang diakibatkan oleh sampah plastik ini. Tiongkok sendiri berada di peringkat pertama dalam total limbah plastik yang terbuang ke lautan dengan kontribusi lebih dari $\frac{1}{4}$ atau 28 persen (The Collective, 2016).

Limbah plastik dan aluminium yang diimpor oleh Tiongkok mayoritas akan masuk ke wilayah Provinsi Guangdong, sebagai salah satu pusat industri pengolahan limbah di Tiongkok. Banyak penduduk, termasuk imigran, beralih pekerjaan dan mendirikan usaha olah limbah yang hingga tahun 2010 terdapat kurang lebih 500 usaha sejenis yang teregistrasi oleh pemerintah di daerah Shenzhen, Guangdong (Yoshida, 2011). Banyaknya fasilitas pengolahan limbah ini memiliki dampak buruk terhadap lingkungan karena menyebabkan polusi di darat, air, dan udara di wilayah tersebut. Hal ini karena praktik yang dijalankan lebih mengedepankan kemurahan biaya daripada keselamatan seperti pembakaran, pembuangan terbuka, dan penggunaan bahan-bahan kimia yang merusak lingkungan (Li, et al., 2011, p. 3).

Di tahun 2007, terdapat laporan bahwa banyak produk-produk yang telah dijual untuk di-*recall* karena terdapat bahan kimia berbahaya di dalamnya. Timbal yang berbahaya bagi manusia ditemukan di mainan anak-anak, di beberapa perhiasan, serta di kacamata untuk anak-anak. Hal ini diyakini terjadi dikarenakan masih ada industri di Tiongkok yang bergantung pada pengolahan limbah elektronik. Kota-kota di Selatan Tiongkok seperti Guiyu merupakan salah satu kota yang bergantung pada industri pengolahan limbah elektronik, dengan perkiraan 60-

80 persen keluarga di kota tersebut menjalankan usaha kecil yang bertujuan mengolah limbah elektronik menjadi barang yang dapat dijual kembali. Hal ini berdampak buruk terhadap kesehatan anak-anak di wilayah tersebut, dengan laporan pada Juli 2007 menemukan bahwa lebih dari 80 persen anak-anak terpapar Timbal melebihi 10 $\mu\text{g/dL}$. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dengan anak-anak dari wilayah yang tidak memiliki latar belakang ekonomi pengolahan limbah (Lee & Chen, 2008, p. 2).

Dampak dari kebijakan impor limbah ini dapat dikatakan tidak merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan mereka yang berasal dari kelas bawah dan kelompok marginal, seperti minoritas etnis dan agama, menjadi kelompok yang paling terdampak. Serta, walaupun usaha dan fasilitas dimiliki oleh masyarakat local, kelompok marginal tersebut menjadi yang terdampak dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan tersebut dilakukan oleh individu dari kelas tersebut (Geeraerts, Illes, & Schweizer, 2015, p. 5). Karena kurangnya integrasi dan penegakkan terhadap regulasi yang melindungi lingkungan, terjadi juga beberapa permasalahan seperti migrasi massal, pemindahan paksa, serta ketidakstabilan sosial (Economy, 2003).

Adanya peningkatan produksi tekstil tentunya menimbulkan permasalahan baru dimana sisa-sisa limbah tekstil ikut berperan dalam mengotori lingkungan. Bahan-bahan sisa seperti baju, celana atau sepatu tidaklah lagi menggunakan bahan yang terbuat dari kain, benang ataupun kulit. Kebanyakan dari mereka justru proses daur ulangnya sulit dikarenakan berasal dari bahan sintetis. Tentunya proses daur ulang ini memerlukan waktu serta biaya besar.

Proses daur ulang ini menjadi proses yang amat penting dimana barang yang masih bisa dipakai dipergunakan kembali dalam rangka untuk pengurangan adanya polusi atau limbah. Sayangnya, Tiongkok tidak melakukan proses daur ulang dengan baik dimana barang yang diterima tidak diolah dengan baik membuat semua jenis limbah padat baik yang kemudian bisa di daur ulang atau yang tidak bisa akan berakhir di Tiongkok (Setyani, 2019, p. 52). Sedangkan limbah yang tidak bisa di daur ulang condong untuk dilenyapkan dengan cara di buang ke laut atau dibakar. Kesalahan dalam pengelolaan limbah ini membuat Tiongkok menjadi urutan pertama di dunia sebagai negara yang mencemarkan lingkungan (Sebayang, 2018).

Di tahun 2010 Tiongkok menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbanyak hingga 3,53 juta M/T sampah plastik pertahun. Bahkan tidak jarang limbah tersebut mengalir ke lautan lepas, sehingga menyebabkan masalah lingkungan seperti polusi air, darat, dan udara. Pada tahun 2012, sekitar 56 persen limbah sampah di Tiongkok diekspor negara diseluruh dunia dan memungkinkan meningkatnya permasalahan ketidakstabilan sosial masyarakat antar-kelas.

2.3 Terbentuknya *Operation National Sword*

Kebijakan *National Sword* merupakan bentuk dari penanganan kekhawatiran pemerintah Tiongkok. Adanya permasalahan ini membuat Tiongkok pun menjadikan isu ini menjadi isu yang cukup krusial. Negara-negara yang memiliki kontribusi dalam pengiriman limbah ke Tiongkok diantaranya; Amerika Serikat (AS), Inggris, Uni Eropa (UE), hingga Jepang. Hingga pada 2013, dibuatlah kebijakan oleh Presiden Xi Jinping yakni *Operation Green Fence* (OGF) sebagai

salah satu solusi bagi Tiongkok untuk mengurangi lonjakan jumlah limbah dengan membatasi sampah daur ulang (Berman, 2019; Wai-chuen, 2013).

Sebelum kebijakan ini dibuat, Tiongkok sendiri sudah merancang sejak tahun 2007 dan 2011, yang dikenal dengan “artikel 12” yang menjelaskan “*In the process of importing solid waste, measures shall be taken to prevent it from spread, seepage and leakage or other measures to prevent pollution of environment.*” (Shengxian, Deming, Ping, Guangzu, & Shuping, 2011, p. 4) Kebijakan tersebut bertujuan untuk menaikkan standar kontaminasi sampah, sehingga diterapkan dalam implementasi *Operation Green Fence (OGF)* pada tahun 2013 (Ritchie, 2018). *Operation Green Fence* sendiri merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah Tiongkok dengan pihak bea cukai dalam memperketat pemeriksaan kontainer-kontainer yang masuk ke wilayah Tiongkok (Velis, 2014). Bahkan dalam lima bulan terakhir saat kebijakan ini dikeluarkan, tercatat bea cukai Tiongkok telah menyita 337 kasus penyelundupan limbah padat senilai 1,7 miliar RMB (Velis, 2014).

Karena perkembangannya yang cukup signifikan Tiongkok pun pada akhirnya kembali memperketat kebijakan mengenai impor. Pada bulan April 2017, pidato sekretaris jendral Partai Komunis Tiongkok yaitu Xi Jinping menyampaikan masalah ekologi menjadi fokus negara dan hal ini terkait salah satunya dengan limbah impor. Pada tanggal 18 Juli 2017, Dalam dokumen yang dikeluarkan *World Trade Organization (WTO)*, Tiongkok mengumumkan pelarangan impor yang akan diterapkan pada tanggal 31 Desember 2017 (WTO, 2017). Dokumen yang dikeluarkan berisi tentang bahayanya limbah bagi lingkungan dan masyarakat dan pada akhir 2019 impor limbah padat akan diberhentikan dan digantikan dengan

sumber daya dalam negeri (The Chinese Central Government's, 2017). Hal ini juga dikarenakan dengan adanya beberapa perusahaan yang mengambil risiko dengan mencari keuntungan secara ilegal dengan memasukkan limbah negara lain secara berulang – kali. Tiongkok kemudian mengobati gejala dan akar penyebabnya. Kebijakan *Operation National Sword* (ONS) yang dikeluarkan memberikan jaminan yang kuat dan indah dalam membangun masyarakat yang makmur di negara Tiongkok (The Chinese Central Government's, 2017). Tepatnya pada 16 Agustus 2017, pemerintah Tiongkok memperkuat kebijakan *Operation National Sword* (ONS) (Recycling Today Staff, 2017). Kemudian, Tiongkok menginformasikan kembali terkait kebijakan lain yang akan diterapkan mengenai sampah daur ulang yaitu *Blue Sky* yang merupakan kelanjutan dari kebijakan *Operation National Sword*. Kebijakan *Blue Sky* berisi mengenai pengetatan dan tindakan keras penyeludupan limbah daur ulang dari luar negeri, dalam mempengaruhi standar kontaminasi pada sampah, sehingga tujuan dari kebijakan *blue sky* adalah untuk memberikan lingkungan yang indah bagi Tiongkok dalam perencanaan tiga tahun kedepan. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dan sejahtera terkait pembangunan ekonomi berkualitas tinggi dan pembangunan Tiongkok yang indah (The Chinese Central Government's, 2018). Dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok dalam menghentikan impor terhadap 4 kategori dan 24 jenis limbah padat dari luar negeri. Termasuk di dalamnya plastik, kertas, tekstil, dan lain-lain. (Semuels, 2019).

Tabel 2.2. Daftar Limbah Padat Yang Dilarang (4 kategori dan 24 jenis)

No.	Kategori	Nomor Komoditas Kepabeanan	Nama Limbah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sumber Sampah Plastik Kehidupan	3915100000	Limbah dan Skrap Polimer Etilen dan Sisa Makanan
2			Film Komposit Aluminium-Plastik
3		3915200000	Limbah dan Sisa-Sisa Polimer Styrene and
4		3915300000	Limbah, Skrap, dan Skrap Polimer Vinil Klorida
5		3915901000	Limbah dan skrap PET, tidak termasuk limbah botol minuman PET (batu bata).
6			Limbah botol minuman PET (bata)
7		3915909000	Sampah dan skrap plastik lainnya, tidak termasuk sisa cakram optik
8			CD bekas
9			2619000021

	Terak Vanadium		20% (kecuali terak granular yang dihasilkan dari peleburan besi dan baja)
10		2619000029	Buih dan terak yang mengandung vanadium lainnya yang diproduksi dengan peleburan besi dan baja (tidak termasuk terak granular yang dihasilkan dari peleburan besi dan baja)
11	Terak Vanadium	2620999011	Terak, abu dan residu yang mengandung logam lain dan senyawanya, vanadium pentoksida > 20% (kecuali yang dihasilkan dari peleburan besi dan baja)
12		2620999019	Terak, abu dan residu yang mengandung logam lain dan senyawanya, 10% < Vanadium pentoksida 20% (kecuali yang dihasilkan dari peleburan besi dan baja)
13	Kertas Bekas Yang Tidak Disortir	4707900090	Kertas atau karton daur ulang lainnya (termasuk sampah dan skrap yang tidak disortir)
14		5103109090	Kerontokan bulu halus hewan lain

15	Limbah Bahan Tekstil	5103209090	Limbah bulu hewan halus lainnya (termasuk limbah benang, tidak termasuk serat daur ulang)	
16		5103300090	Limbah bulu hewan kasar lainnya (termasuk limbah benang, tidak termasuk serat daur ulang)	
17		5104009090	Serat daur ulang dari bulu halus atau kasar hewan lain	
18		5202100000	Benang kapas bekas (termasuk benang kapas bekas)	
19		5202910000	Serat kapas daur ulang	
20		5202990000	Limbah kapas lainnya	
21		5505100000	Limbah serat sintetis (termasuk noil, limbah benang dan serat daur ulang)	
22		5505200000	Limbah serat buatan (termasuk noil, limbah benang dan serat daur ulang)	
23			6310100010	Sortir kain robek yang terbuat dari bahan tekstil baru atau tidak terpakai (baru atau tidak terpakai, termasuk sisa benang, tali, kabel, kabel dan produknya)

24	Limbah Bahan Tekstil	6310900010	Bahan tekstil baru atau tidak terpakai dan kain robek lainnya, dll. (baru atau tidak terpakai, termasuk limbah benang, tali, kabel, kabel dan produknya)
----	-------------------------	------------	--

Sumber: (WTO, 2017, pp. 1-2)

Kebijakan ini kemudian diresmikan pada 1 Januari 2018, Kebijakan *Operation National Sword (ONS)* yang dikeluarkan oleh Tiongkok membuat beberapa negara kebingungan. Akan tetapi Tiongkok masih melakukan impor limbah ke beberapa negara dengan kapasitas yang rendah seperti Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat dan Jepang (Liqiang, 2019). Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan luar negeri untuk tercapainya tujuan nasional, yang mana kebijakan luar negeri menurut Brian White adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk tercapainya kerja sama dengan dunia internasional dalam upaya meraih tujuan nasional (White, 2001, p. 318). Kebijakan ini akan terus berkembang, dari melarang banyaknya limbah yang masuk kemudian tahun 2020 akan berpotensi pelarangan masuknya seluruh bahan daur ulang (Trufelman, 2019).

Pada forum yang diselenggarakan oleh *World Trade Organization (WTO)* Tiongkok dikritik karena perubahan kebijakan yang sangat tiba-tiba. Kritik itu datang dari negara AS, UE, Korea Selatan, Kanada, dan Australia. Amerika Serikat berpendapat bahwa jika perdagangan limbah global terganggu akibat kebijakan Tiongkok ini, maka dampaknya adalah meningkatnya sampah di lautan. Amerika Serikat dan Jepang yang merupakan salah satu sumber eksportir sampah plastik ke

Tiongkok berusaha untuk mencari wilayah lain yang dapat menerima sampah mereka, dan pilihannya jatuh ke wilayah Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Vietnam, serta India (Kyodo, 2018).

Namun, karena ditemukan banyak importir limbah ilegal serta dampak lingkungan dan penyakit yang mungkin terjadi karena proses daur ulang plastik yang tidak berkualitas maka Malaysia terlihat ingin mengikuti jejak langkah Tiongkok dengan kebijakan pembatasan impor limbah. Australia, salah satu negara eksportir sampah, juga mengalami *shock* karena kebijakan Tiongkok. Sebelumnya, beberapa otoritas sampah di Australia selalu mengekspor sampah mereka ke luar negeri, namun karena perubahan kebijakan yang dilakukan Tiongkok hampir 80 persen dari sampah yang dapat didaur ulang dilakukan di fasilitas yang ada di dalam negeri, dan sisanya diekspor ke India (Agence France-Presse, 2019).

Di Eropa, seperti Inggris, setelah Tiongkok mengeluarkan kebijakan ONS, fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di sana mengalami peningkatan 665,000 ton sampah menjadi lebih dari 11 juta ton pada tahun 2018. Walaupun hal tersebut diakui beberapa pihak sebagai hal yang positif, namun lembaga non-profit *Zero Waste Europe* berpendapat bahwa bahkan fasilitas pengolah sampah menjadi energi yang paling terbarukan pun tetap akan mengeluarkan polutan berbahaya sebagai dampak proses perubahan sampah menjadi energi melalui mekanisme pembakaran. Oleh karena ini beberapa negara di Eropa lebih memilih untuk berusaha mengurangi limbah dengan beberapa cara. Inggris melakukan penambahan pajak bagi produsen yang tidak menggunakan kemasan yang 30 persen sumbernya berasal dari bahan daur ulang. Sedangkan Norwegia mengadopsi sistem baru di mana produk plastik botol sekali pakai harus mudah didaur ulang,

tidak ada zat berbahaya, label yang mudah hancur, serta jika tidak berhasil mencapai standar tersebut diharuskan membayar pajak tambahan (Katz, 2019).

Korea Selatan juga terdampak oleh kebijakan ONS Tiongkok. Walaupun banyak perusahaan yang bergerak di bidang kertas asal Korea Selatan yang senang oleh kebijakan Tiongkok, karena sumber bahan produksi yang masuk ke mereka jadi lebih banyak dan harganya jadi lebih murah. Namun, pekerja yang bertugas untuk mengambil sampah kertas untuk kemudian diolah dan didaur ulang merasakan dampak yang tidak meyenangkan. Kebanyakan dari pekerja ini berumur lebih dari 60 tahun, dan setelah Korea Selatan dibanjiri kertas impor menjadikan pekerjaan mereka menjadi lebih berat dengan gaji yang tidak sepadan (Seo, 2019).

2.4 Hasil Penyajian Data

Perkembangan ekonomi yang pesat bagi Tiongkok tidak terlepas dari adanya kebijakan ekspor dan impor yang dilakukan. Kebijakan yang bermula sekitar tahun 1990 ini berakibat pada perkembangan yang pesat di aspek ekonomi dan standar hidup. Terdapat tiga (3) alasan mengapa Tiongkok melakukan kegiatan impor, pertama dikarenakan produk limbah bahan baku luar negeri memiliki kualitas yang lebih baik dibanding domestik. Kedua, dari masuknya Tiongkok dengan WTO, Tiongkok memulai ekspor komoditinya dengan memakai kapal konteiner, yang mana para pelaku industri melihat adanya keuntungan ini dengan cara memasukkan limbah ke konteiner yang kosong bekas ekspor yang akan kembali ke Tiongkok untuk menekan angka biaya impor. Ketiga, tingginya faktor ekspor Tiongkok disebabkan SDM yang berlimpah dengan biaya rendah, limbah yang berlimpah dan SEZs yang dianggap special bagi para pelaku industry.

Industri tekstil dan pakaian merupakan salah satu industri yang produktif bagi perekonomian Tiongkok, salah satu bahannya adalah poliester. Hal ini menyebabkan perkembangan permintaan ekspor terus bertambah, akan tetapi tidak diiringi pula dengan sistem daur ulang limbah yang efisien. Sehingga memiliki dampak menumpuknya limbah yang berakibat pada terjadinya peningkatan limbah yang ada ditambah dengan pengelolaan limbah domestik menjadi tidak efisien yang menghasilkan angka tingkat pencemaran lingkungan juga semakin tinggi. Hal ini membuat Tiongkok menjadikan isu ini menjadi isu yang krusial, sehingga perlu mengobati gejala dan akar penyebabnya.

Kebijakan OGF yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok merupakan bentuk dari pencegahan permasalahan dampak impor limbah, meskipun kebijakan ini belum sepenuhnya kuat dan efektif. Sehingga perlunya penguatan kebijakan OGF menjadi ONS dengan kebijakan lanjutan yaitu blue sky. Kebijakan ONS merupakan kebijakan yang bertujuan membatasi sampah daur ulang akibat lonjakan yang tinggi dan mencegah para pelaku industri yang mencari keuntungan dengan mengambil risiko dengan memasukkan limbah ke Tiongkok secara berkali-kali. Kebijakan ini membahas mengenai bahayanya limbah bagi lingkungan dan masyarakat dengan melarang kegiatan impor limbah dengan 4 kategori dan 24 jenis limbah padat. Kebijakan ini merupakan bagian dari tercapainya kepentingan nasional. Kebijakan ONS akan terus berkembang dan memungkinkan untuk menutup impor semua limbah padat yang akan masuk pada tahun 2020.